



## Tugas dan Fungsi Koordinasi Dinas Kesehatan dengan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wae Kanta Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat

Emilianus Jewandi<sup>1\*</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>2</sup>, Agnes Doortji Rema<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [jewandi12345@gmail.com](mailto:jewandi12345@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hernimus@staf.undana.ac.id](mailto:hernimus@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [agnes.rema@staf.undana.ac.id](mailto:agnes.rema@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [jewandi12345@gmail.com](mailto:jewandi12345@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze the coordination between the Health Office and the village government in improving health services at Wae Kanta Public Health Center, Lembor District, West Manggarai Regency. This research employs an empirical legal method with socio-legal and conceptual approaches. Data were collected through interviews, observations, and document studies involving 20 respondents selected using purposive sampling. The results indicate that health services at Wae Kanta Public Health Center are still functioning, particularly in promotive and preventive programs; however, their effectiveness has not been optimal. This condition is influenced by limited infrastructure, inadequate accessibility, suboptimal coordination between institutions, and constraints in human resources and facilities. In addition, low public trust and geographical challenges further hinder service delivery. Efforts to improve services have been carried out through policy strategies, annual evaluations, and planning mechanisms, yet their implementation remains limited. Therefore, strengthening coordination between the Health Office and the village government, improving infrastructure, and enhancing human resource capacity are essential to achieve optimal and sustainable health service delivery.*

**Keywords:** *Coordination; Health Office; Health Services; Public Health Center; Village Government.*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Wae Kanta masih berjalan, khususnya pada program promotif dan preventif, namun belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang rendah, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat dan kondisi geografis turut menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui strategi kebijakan, evaluasi berkala, dan perencanaan, namun implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur guna mencapai pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Dinas Kesehatan; Koordinasi; Pelayanan Kesehatan; Pemerintah Desa; Puskesmas.

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan di Indonesia tersusun secara hierarkis mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Struktur ini dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif (Setyaasih et al., 2023). Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Taufiqurokhman, 2023).

Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, Puskesmas berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Puskesmas tidak hanya memberikan pelayanan kuratif, tetapi juga berperan dalam upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Gunawan, 2024). Keberadaan Puskesmas menjadi sangat penting dalam menjamin pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil.

Namun demikian, optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas, serta aksesibilitas layanan kesehatan.

Dalam praktiknya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas membutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak, terutama antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa. Koordinasi yang baik menjadi kunci dalam mengatasi berbagai kendala yang sering muncul, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga medis, serta hambatan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Tanpa adanya sinergi yang optimal, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat cenderung tidak maksimal.

Kondisi tersebut dapat diamati pada Puskesmas Wae Kanta yang terletak di Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puskesmas ini melayani lima desa dengan jumlah penduduk sekitar 10.055 jiwa serta wilayah kerja seluas kurang lebih 43 km<sup>2</sup> yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Keberadaan Puskesmas Wae Kanta menjadi sangat penting karena sebelumnya masyarakat harus mengakses layanan kesehatan ke fasilitas lain yang relatif jauh, sehingga kehadirannya meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat setempat.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Wae Kanta. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan fasilitas, belum optimalnya infrastruktur pendukung, serta kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan terhadap pelayanan kesehatan yang optimal dengan realitas di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis tugas dan fungsi koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Wae Kanta, Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Koordinasi merupakan proses penyalarsan aktivitas dan sumber daya antar individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Koordinasi bertujuan mencegah terjadinya tumpang tindih, konflik, maupun kekosongan pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi (Tololiu et al., 2022). Dalam konteks pemerintahan, koordinasi menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan dan program berjalan secara terintegrasi, terutama yang melibatkan lebih dari satu lembaga.

### **Desa dan Pemerintahan Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa mencakup pengelolaan pembangunan serta pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas dan dukungan terhadap pelayanan dasar.

### **Peran Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dinas ini memiliki fungsi dalam

perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program kesehatan di tingkat daerah (Ginanjar et al., 2025).

Sebagai koordinator layanan kesehatan, Dinas Kesehatan berperan dalam memastikan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, termasuk melalui pengelolaan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (Sinadia et al., 2018).

### **Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan**

Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta memungkinkan individu hidup produktif (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; WHO). Pelayanan kesehatan merupakan serangkaian upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang baik harus memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan mutu agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (Prapitasari et al., 2020).

### **Peran Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan**

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Puskesmas berperan dalam penyelenggaraan pelayanan promotif dan preventif, serta didukung oleh pelayanan kuratif dan rehabilitatif (Permenkes No. 75 Tahun 2014). Keberhasilan Puskesmas sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan dan pemerintah desa. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

### **Koordinasi dalam Pelayanan Kesehatan Desa**

Peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat desa memerlukan sinergi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa. Koordinasi yang efektif memungkinkan penyelesaian berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, dan akses layanan. Namun, masih terdapat hambatan dalam implementasi pelayanan kesehatan, seperti kondisi geografis, keterbatasan sarana prasarana, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan di Puskesmas Wae Kanta (Sukardan, 2015). Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Wae Kanta, Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi objek penelitian dengan permasalahan yang dikaji (Monteiro, 2023).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami aspek sosial dalam penerapan hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian (Marzuki, 2025). Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, pemerintah desa, tenaga medis, dan masyarakat. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wae Kanta**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Wae Kanta masih berjalan, terutama melalui program promotif dan preventif seperti Posyandu. Namun, tingkat efektivitas pelayanan belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, akses jalan yang kurang memadai, serta lokasi Puskesmas yang relatif jauh dari permukiman masyarakat di lima desa wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan program kesehatan sebagian besar masih bertumpu pada tenaga kesehatan, sementara keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung program tersebut masih terbatas. Padahal, sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer.

Selain itu, keterbatasan akses jalan dan jaringan turut memengaruhi kelancaran pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa belum berjalan optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait peran Puskesmas dalam mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer.

### **Strategi Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain penyediaan jaringan, evaluasi tahunan, pendataan kondisi kesehatan masyarakat, serta perencanaan perbaikan infrastruktur jalan. Strategi ini menunjukkan adanya upaya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Dalam praktiknya, Dinas Kesehatan berperan dalam perencanaan dan evaluasi program, sedangkan pemerintah desa berperan dalam mendukung pelaksanaan program di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menegaskan kewenangan pemerintah desa dalam mengoordinasikan pembangunan secara partisipatif.

### **Perencanaan dalam Mengatasi Keterbatasan Pelayanan**

Perencanaan dilakukan melalui evaluasi tahunan, pemetaan kondisi kesehatan masyarakat, serta identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Upaya ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang ada di Puskesmas Wae Kanta sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antar lembaga.

Namun, pelaksanaan perencanaan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan keterbatasan partisipasi pemerintah desa dalam beberapa program. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang lebih memilih pengobatan tradisional dibandingkan pelayanan di Puskesmas, yang menunjukkan adanya masalah kepercayaan terhadap layanan kesehatan.

### **Faktor Penghambat Pelayanan Kesehatan**

#### ***Sumber Daya Manusia (SDM)***

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Wae Kanta relatif cukup, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan. Hal ini terlihat dari masih kurangnya tenaga kesehatan di beberapa bidang tertentu, seperti dokter gigi dan tenaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, tingkat pendidikan tenaga kesehatan yang didominasi oleh lulusan Diploma (DIII) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi masih diperlukan untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.

Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah juga memengaruhi pemahaman terhadap pentingnya pelayanan kesehatan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan terhadap Puskesmas.

### ***Sarana dan Prasarana***

Sarana dan prasarana di Puskesmas Wae Kanta secara umum tersedia, namun belum memadai. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan fasilitas air, jaringan yang tidak stabil, serta belum tersedianya fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan akses bagi penyandang disabilitas.

Kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik juga menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014.

### ***Anggaran***

Dari aspek anggaran, pendanaan Puskesmas Wae Kanta dinilai cukup untuk mendukung operasional pelayanan dasar. Namun, anggaran tersebut belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif serta dukungan tambahan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang ada.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Wae Kanta belum berjalan secara optimal. Meskipun pelayanan kesehatan tetap berlangsung, khususnya melalui program promotif dan preventif, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses geografis, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, serta rendahnya keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung program kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Upaya peningkatan pelayanan telah dilakukan melalui strategi kebijakan dan perencanaan seperti evaluasi berkala,

pemetaan kondisi kesehatan masyarakat, dan pengembangan sarana prasarana, namun implementasinya belum maksimal akibat kendala pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengelolaan anggaran. Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas secara menyeluruh untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Wae Kanta dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan pihak Puskesmas secara berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, perbaikan dan pengembangan sarana serta prasarana seperti akses jalan, fasilitas air, jaringan, dan fasilitas pendukung lainnya, serta pelaksanaan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Wae Kanta dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Andersen, R. M. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care. *Journal of Health and Social Behavior*, 36(1), 1–10. <https://doi.org/10.2307/2137284>
- Ginanjar, R., et al. (2025). *Manajemen pelayanan kesehatan daerah*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Gulliford, M., Figueroa-Munoz, J., Morgan, M., et al. (2002). What does ‘access to health care’ mean? *Journal of Health Services Research & Policy*, 7(3), 186–188. <https://doi.org/10.1258/135581902760082517>
- Gunawan. (2024). Analisis hambatan administrasi terhadap akses pelayanan kesehatan di puskesmas desa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 1–10. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., et al. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era. *The Lancet Global Health*, 6(11), e1196–e1252. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3)
- Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian hukum*. Universitas Airlangga Press.
- Monteiro, J. M. (2023). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Setara Press.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Peters, D. H., Garg, A., Bloom, G., et al. (2008). Poverty and access to health care in developing countries. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1136(1), 161–171. <https://doi.org/10.1196/annals.1425.011>
- Prapitasari, D., et al. (2020). Kualitas pelayanan kesehatan dalam perspektif aksesibilitas dan mutu layanan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 120–130.
- Setyaasih, S., et al. (2023). *Dimensi kinerja kepala desa: Perspektif kompetensi, kecerdasan emosional, dan personality*. Literasi Nusantara.
- Sinadia, R., et al. (2018). Peran puskesmas dalam sistem pelayanan kesehatan primer. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 7(3), 145–152.
- Sukardan, A. (2015). *Pedoman penulisan skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Taufiqurokhman. (2023). Kebijakan pemerintah dalam memajukan kualitas sumber daya manusia unggul. *Jurnal Swatantra*, 21(2), 185–195. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Tololiu, A., et al. (2022). Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 45–56.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- World Health Organization. (2010). Monitoring the building blocks of health systems: A handbook of indicators and their measurement strategies. <https://doi.org/10.2471/BLT.10.080499>
- World Health Organization. (n.d.). *Constitution of the World Health Organization*. WHO.